

Determinan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Muhammad Wijdan Nabil, Reikha Habibah Yusfi

Universitas Negeri Semarang

nabil1805@students.unnes.ac.id, yusfi_rei@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of the Labor Force Participation Rate (LFPR), the Human Development Index (HDI), and economic growth on poverty in East Nusa Tenggara (NTT) from 2014 to 2024. The study employs panel data combining cross-sectional data from 22 regencies/cities in NTT with an 11-year time series, resulting in 242 observation units. Panel data regression analysis was conducted using the Fixed Effects Model (FEM), determined to be the most appropriate model. The research findings indicate that the LFPR has a significant negative impact on poverty, suggesting that increased workforce participation contributes to poverty reduction, albeit to a relatively small extent. The HDI also has a significant negative impact on poverty, demonstrating that improving workforce quality—through education, health, and a decent standard of living—plays a crucial role in alleviating poverty. Meanwhile, economic growth shows a negative but insignificant impact on poverty, indicating that financial progress in NTT has not been fully inclusive and has failed to reach the poor population equitably. These results highlight the importance of improving workforce quality, creating productive employment opportunities, and fostering more inclusive economic development as strategies to reduce poverty in NTT.

Keywords: Poverty, LFPR, HDI, Economic Growth, Panel Data, NTT

ABSTRAK

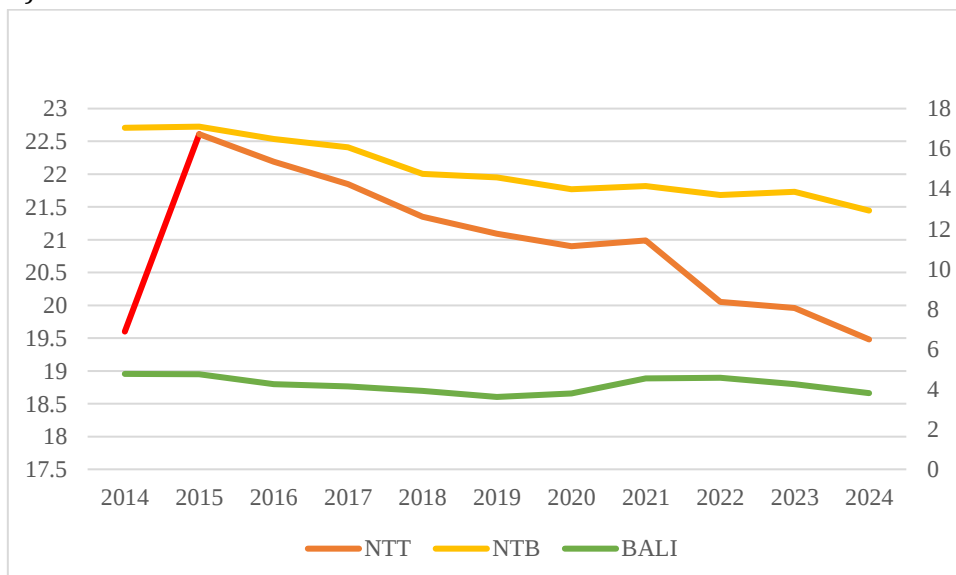
Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2014–2024. Penelitian ini menerapkan data panel mengkombinasikan cross-section 22 kota di NTT dan time series 11 tahun sehingga menghasilkan 242 unit pengamatan. Analisis regresi data panel dilakukan menggunakan FEM selaku model tepat berdasarkan capaian penentuan model. Capaian riset memperlihatkan bahwasanya TPAK mempunyai dampak negatif dan signifikan kemiskinan, yang mengindikasikan bahwasanya kenaikan keikutsertaan pekerja mampu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan meskipun besarnya pengaruh relatif kecil. IPM juga berdampak negatif dan signifikan pada kemiskinan, yang menunjukkan bahwasanya kenaikan mutu pekerjaannya dengan pendidikan, kesehatan, dan mutu kehidupan layak berfungsi krusial dalam menurunkan kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan dampak negatif tetapi tidak signifikan pada kemiskinan, menandakan bahwasanya kemajuan finansial di Provinsi NTT tidak seluruhnya bersifat inklusif dan tidak bisa meraih kelompok rakyat miskin secara merata. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kenaikan mutu pekerjaannya, penghasilan peluang kerja produktif, dan pembangunan ekonomi lebih inklusif selaku rencana menurunkan kemiskinan di NTT.

Kata Kunci: Kemiskinan, TPAK, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Data Panel, NTT

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah masalah sosial-ekonomi yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diatasi. Keberadaan kemiskinan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya kesenjangan sosial, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, serta terhambatnya proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar rendahnya pendapatan, kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan rakyat guna berpendidikan layak, pelayanan kesehatan layak, pekerjaan yang manusiawi, dan infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan sehari-hari (Badan Pusat Statistik, 2024).). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan ialah permasalahan multidimensional bukan sekedar berhubungan finansial, namun menyangkut kualitas hidup dan kesempatan masyarakat untuk berkembang. Kemiskinan yang tak kunjung mereda di suatu daerah menjadi cerminan bahwasanya kemajuan finansial yang ada bersifat eksklusif dan sekedar dirasa setengah masyarakat, selainnya lapisan rakyat paling bawah tidak turut merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, wawasan komprehensif terkait aspek mendampakkan tingkat kerentanan finansial jadi krusial selaku dasaran menyusun ketentuan penanggulangan kemiskinan yang efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan (Kesuma & Yasa, 2025)

Di tingkat nasional, angka kemiskinan Indonesia secara konsisten menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Namun, penurunan tersebut tidak merata di seluruh provinsi, dan NTT menjadi salah satu daerah yang paling lambat mengalami perbaikan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan NTT masih mencapai 19,48%, capaian ini menempatkan NTT di urutan ketiga provinsi termiskin secara nasional, hanya di bawah Papua dan Papua Pegunungan (Policy Brief BKKBN NTT, 2024).

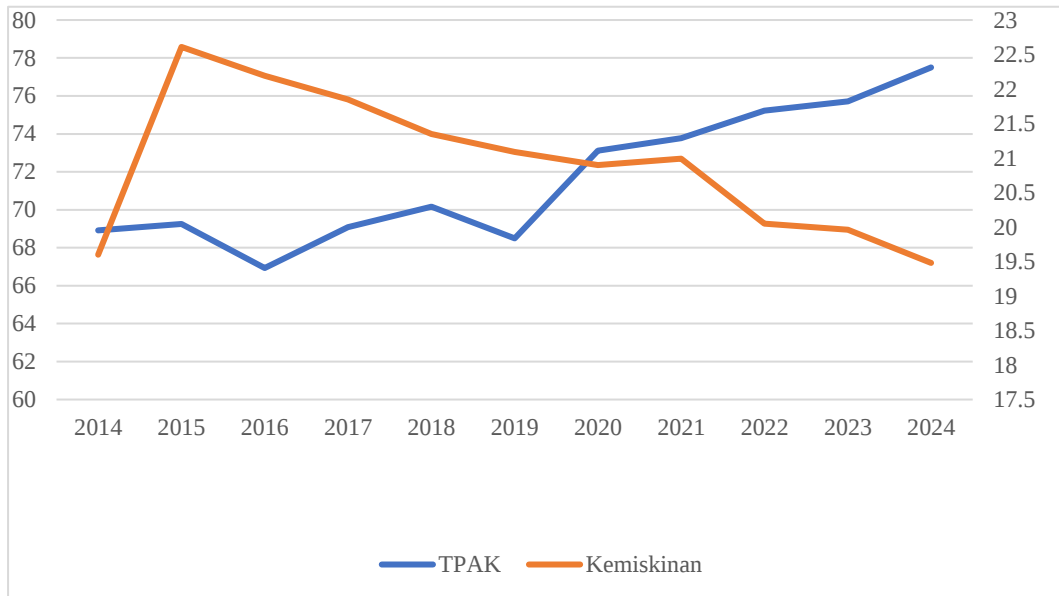


Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan dalam bentuk persen Provinsi NTT, BALI, dan NTB 2014–2024

Berdasarkan Gambar 1. Perkembangan kemiskinan di NTT tahun 2014–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun meskipun masih mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan NTT sempat meningkat hingga sekitar 22,5 persen pada tahun 2015, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai sekitar 19,4 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan NTT tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang periode tersebut. Pada periode yang sama, NTB mencatat tingkat kemiskinan yang lebih rendah dengan tren menurun dari sekitar 16 persen menjadi 13 persen, sedangkan BALI memiliki tingkat kemiskinan paling rendah dan relatif stabil pada kisaran 4–5 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di NTT masih lebih kompleks dibandingkan kedua provinsi lainnya, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif menaikkan mutu pekerja, memperbanyak peluang pekerjaan, dan menunjang kemajuan finansial lebih inklusif guna mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

TPAK ialah parameter krusial menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dan tingkat keterlibatan pekerja pada finansial, selaku tenaga kerja ataupun pencari kerja. Tingginya TPAK mencerminkan besarnya proporsi penduduk yang aktif dalam aktivitas ekonomi produktif serta menunjukkan kemampuan wilayah dalam memperdayakan pekerja dimilikinya. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, TPAK juga mencerminkan akses masyarakat terhadap peluang kerja dan sumber pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan TPAK umumnya dikaitkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan pendapatan, sedangkan rendahnya TPAK dapat mengindikasikan terbatasnya peluang kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, atau ketidakseimbangan kompetensi pekerja dan keperluan sektor ketenagakerjaan.

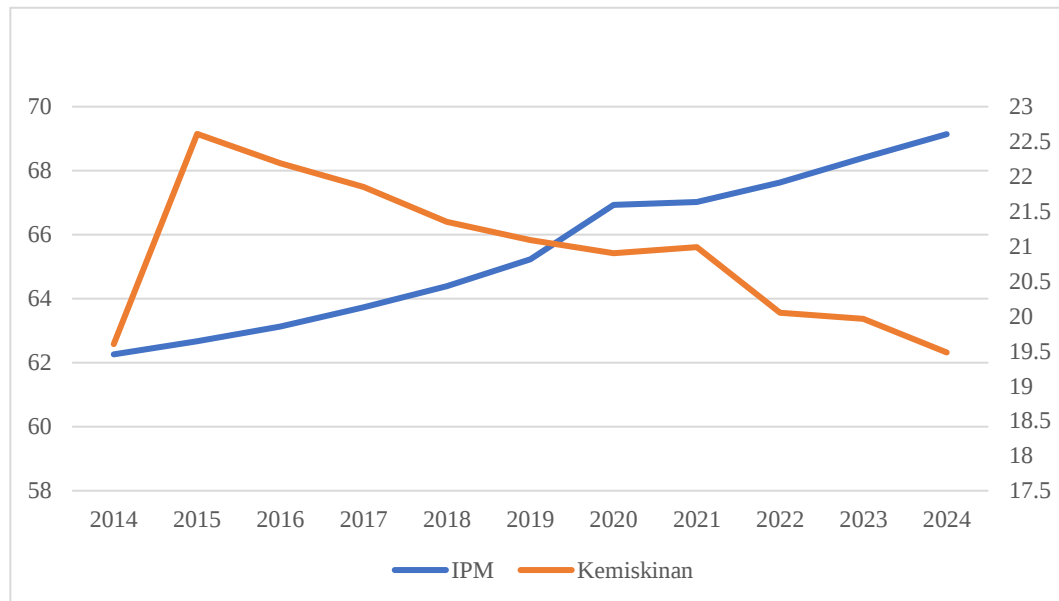
Teoritisnya, kenaikan TPAK bisa mengurangi tingkat kemiskinan dikarenakan semakin banyak rakyat terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin besar pula peluang memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung karena tingginya TPAK belum tentu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila mayoritas pekerja pada bidang informal, berupah rendah, dan berproduktivitas minim. Dengan itu, mutu pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja jadi aspek krusial yang menentukan efektivitas TPAK dalam mengurangi kemiskinan. Selain mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, TPAK juga digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan dan menyerap tenaga kerja. Menurut Sianturi (Sianturi *et al.*, 2024). TPAK merupakan indikator strategis dalam menganalisis dinamika pasar kerja karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 2. Perkembangan TPAK dan Kemiskinan dalam bentuk persen Provinsi NTT Tahun 2014–2024

Berdasarkan Gambar 2, TPAK di NTT menunjukkan tren yang tinggi dan terus meningkat, yang mengindikasikan makin banyaknya pekerja ikut serta pada kegiatan ekonomi. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya mampu mendorong penurunan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, tingginya TPAK belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kerentanan kemiskinan dikarenakan mayoritas pekerja masih terserap bidang pertanian subsisten dan pekerjaan informal produktivitas serta penghasilan minim. Akibatnya, kenaikan TPAK tidak secara langsung mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Sianturi *et al.*, 2024).

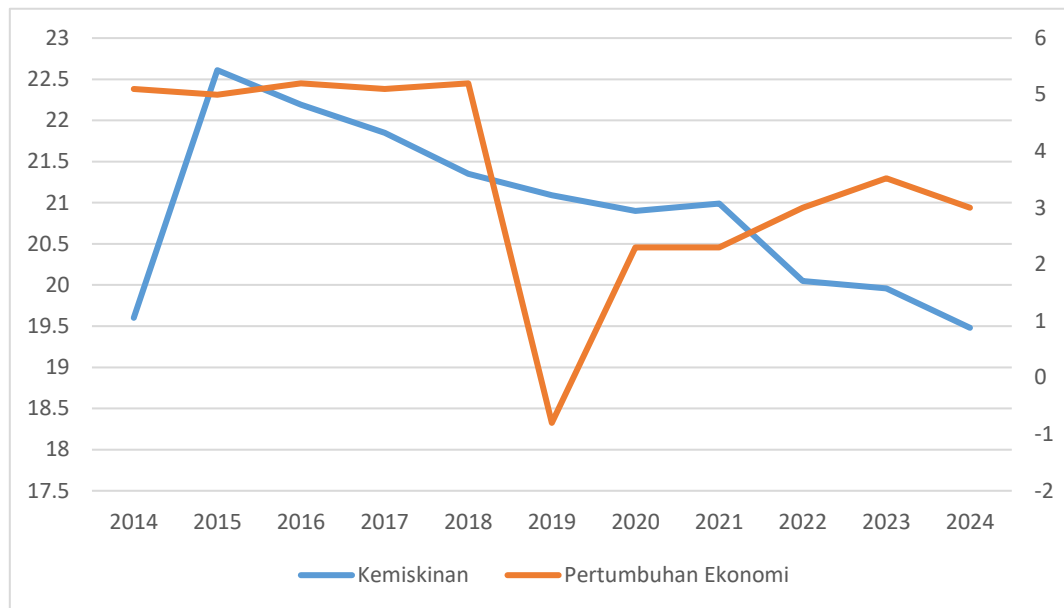
Aspek lainnya turut mempengaruhi kemiskinan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas manusia menjadi fondasi utama dalam menekan angka kemiskinan secara struktural dan jangka panjang. Dengan itu, IPM bukan sekedar dipandang hasil pembangunan, namun instrumen mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan. Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa IPM mempunyai keterkaitan negatif pada kemiskinan, kenaikan kualitas manusia cenderung diiringi berkurangnya jumlah penduduk miskin (Kamsina & Khoirudin, 2024).



Gambar 3. Perkembangan IPM dalam bentuk indeks dan Kemiskinan dalam bentuk persen Provinsi NTT Tahun 2014–2024

IPM NTT memperlihatkan tren kenaikan 62,26 tahun 2014 menjadi 69,14 pada tahun 2024, memperlihatkan pembenahan pada pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Secara teoritis, peningkatan IPM seharusnya mampu menurunkan kerentanan kemiskinan dengan kenaikan mutu pekerja. Tetapi, kondisi empiris menunjukkan bahwa kenaikan IPM di NTT belum diiringi menurunnya kemiskinan yang mendalam. Menandakan bahwa perbaikan kualitas manusia belum sepenuhnya didukung oleh tersedianya kesempatan ekonomi yang memadai, sehingga manfaat pembangunan belum terdistribusi secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi turut jadi parameter kunci analisis kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi terlihatnya kenaikan kapasitas barang dan layanan pada daerah diperkirakan bisa menghasilkan bidang ketenagakerjaan, menaikkan penghasilan rakyat, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kemajuan finansial tinggi seharusnya menyalurkan efek *trickle-down*, yaitu manfaat pembangunan bisa dirasa semua masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, kemajuan ekonomi tidaklah kerap diiringi penghasilan merata. Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau bidang tertentu, sehingga berimbas terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji apakah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah benar-benar bersifat inklusif dan mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian terdahulu memperlihatkan capaian yang beragam mengenai hubungan perkembangan ekonomi dan kemiskinan, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut pada konteks wilayah tertentu.



Gambar 4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dalam bentuk persen Provinsi NTT Tahun 2014–2024

Pertumbuhan ekonomi NTT sebelum pandemi relatif stabil di kisaran 5 persen, kemudian mengalami perlambatan pada 2019–2020 sebelum kembali meningkat hingga mencapai 3,52 persen pada 2023. Namun, perbaikan ekonomi tersebut tidak seluruhnya bisa mengurangi kemiskinan secara optimal dikarenakan pembangunan tidak merata pada semua masyarakat. Kesenjangan antara sektor formal dan informal, rendahnya produktivitas pekerja, dan terbatasnya akses pendidikan, dan pekerjaan layak menjadi faktor yang menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan di NTT (Holivil, 2020)

Provinsi NTT menjadi menarik untuk diteliti karena memiliki karakteristik pembangunan ekonomi yang cukup kompleks. Di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus dilakukan, NTT menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, serta TPAK dari tahun ke tahun, penelitian ini merujuk pada pemikiran Todaro & Michael P., (2015) mengenai kemiskinan sebagai landasan analisis yang menyatakan bahwasanya kemiskinan dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap aset produktif, dan lemahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka ini, TPAK menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk yang aktif bekerja dan berpenghasilan, IPM merefleksikan kualitas SDM yang menentukan kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi yang seharusnya memperluas peluang pendapatan bagi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji determinan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, namun menghasilkan temuan yang beragam. Kamsina & Khoirudin (2024) menemukan bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di NTT. Temuan tersebut didukung oleh Kesuma & Yasa (2025) yang menunjukkan bahwa IPM menjadi faktor yang paling dominan dalam menjelaskan variasi kemiskinan antar kabupaten/kota di NTT. Sementara itu, Ngole Bunga & Haryanto (2024) memaparkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan, meskipun dampaknya belum merata di seluruh wilayah. Di sisi lain, Panjaitan (2020) dan Hutajulu (2026) membuktikan bahwa IPM berdampak signifikan terhadap kemiskinan, sementara TPAK tidak berpengaruh signifikan. Berbeda dengan riset Sianturi et al. (2024) memaparkan bahwasanya TPAK berdampak signifikan pada kemiskinan di Kota Medan. Ketidaksesuaian capaian penelitian tersebut memperlihatkan bahwasanya dampak TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi pada kerentanan kemiskinan masih bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik wilayah. Dengan itu, riset ini hadir guna mengisi kesenjangan penelitian menganalisis pengaruh TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan di NTT menggunakan data panel kabupaten/kota tahun 2014–2024.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai determinan kemiskinan di NTT masih harus dilakukan secara mendalam. Urgensi penelitian ini muncul karena NTT masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun memiliki TPAK relatif tinggi, IPM yang kerap meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan berbagai indikator pembangunan belum secara langsung mampu menurunkan kemiskinan, hingga diasumsikan adanya aspek lainnya yang memberikan dampak efektif pada pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil riset sebelumnya terkait dampak TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan masih menunjukkan temuan yang beragam, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi daerah. Oleh karena itu, riset ini dilakukan guna mengkaji dampak TPAK, IPM, dan perkembangan ekonomi pada kemiskinan di NTT selama periode 2014–2024. Capaian riset ini bertujuan untuk menjadi bukti empiris yang relevan dan menjadi dasar susunan ketentuan pengentasan kemiskinan efektif, tepat sasaran, dan menyesuaikan kondisi wilayah.

METODE PENELITIAN

Studi menerapkan pendekatan kuantitatif mempergunakan data sekunder berbentuk panel, yakni kombinasi antara dimensi *cross-section* berisi 22 kota di NTT dan dimensi *time series* dari 2014 hingga 2024, sehingga menghasilkan 242 unit pengamatan (Sugiyono, 2019). Seluruh data bersumber dari BPS Provinsi NTT dan BPS nasional, mencakup variabel kemiskinan, TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Dalam kerangka model yang dibangun, kemiskinan ditempatkan sebagai variabel dependen, sementara TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi difungsikan sebagai variabel independen. Keterkaitan antar variabel riset ini dikatakan berbentuk persamaan regresi data panel yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$KEMISKINAN = \beta_0 + \beta_1 TPAK + \beta_2 IPM + \beta_3 PERTUMBUHAN EKONOMI + \varepsilon$$

Keterangan

KEMISKINAN	:	Persentase penduduk miskin kabupaten/kota (%)
β_0	:	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	:	Koefisien regresi masing-masing variabel independen
TPAK	:	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
IPM	:	Indeks pembangunan manusia
PERTUMBUHAN EKONOMI	:	Laju pertumbuhan ekonomi (%)
E	:	Error term

Seluruh tahapan analisis data menggunakan pendekatan regresi data panel. Guna menetapkan model penilaian tepat, dilakukan dua tahapan uji beruntun, yakni Uji Chow sebagai penentu CEM dan FEM, serta Uji LM guna mempertimbangkan CEM dan REM. Guna memastikan ketepatan model sebelum hasil regresi dijelaskan, dilakukan pula uji asumsi klasik berisikan normalitas dengan Jarque-Bera, multikolinearitas melalui matriks korelasi, heteroskedastisitas menggunakan *Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test*, dan autokorelasi dengan Durbin-Watson

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Studi ini mengolah data dan menghimpun informasi 22 kabupaten/kota di NTT dari tahun 2014 sampai 2024, menghasilkan total 242 unit pengamatan. Guna menentukan pendekatan yang tepat, tersedia tiga pilihan model dalam regresi data panel, yakni CEM, FEM, dan REM, proses seleksinya dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan *Lagrange Multiplier* (LM). Hasil uji ini tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. Pemilihan model

Chow test			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	317,708872	(21,217)	0,0000
Cross-section Chi-squa	836,779701	21	0,0000
Hausmann test			
Test Summary	Chi-Sq. Statis	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6,711675	3	0,0417

Pemilihan model memperlihatkan bahwasanya menghasilkan prob. Cross-section Chi-square 0,000, sehingga pendekatan FEM sesuai daripada CEM. Lalu, uji Hausman menghasilkan prob. $0,0417 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwasanya FEM konsisten daripada REM. Sehingga FEM lebih tepat diterapkan dalam model regresi penelitian ini

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Normality Test-Jarqu Bera

Jarque Bera	106,5378	Probability	0,065226
-------------	----------	-------------	----------

Hasil pada Tabel 2 pengujian normalitas jarque bera menunjukkan nilai probabilitas 0,065226 dimana melebihi 0,05. Sehingga menyimpulkan bahwasanya ini terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	TPAK	IPM	PERTUMBUHAN EKONOMI
TPAK	1,000000	-0,071888	-0,294152
IPM	-0,071888	1,000000	-0,252378
PERTUMBUHAN EKONOMI	-0,294152	-0,294152	1,000000

Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen tidak ada yang melampaui angka 0,80, dengan korelasi paling tinggi tercatat antara TPAK dan Pertumbuhan Ekonomi yakni sebesar 0,294152 yang masih terbilang aman. Hasil ini membuktikan bahwa hubungan linear kuat antar variabel bebas bisa dikesampingkan, sehingga multikolinearitas tidak menjadi gangguan dalam analisis.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,848882	1,359618	5,772860	0,2756
TPAK	0,007898	0,031750	0,248774	0,8038
IPM	-0,129180	0,022711	-5,687944	0,4313
PERTUMBUHAN EKONOMI	0,016377	0,011106	1,474593	0,1418

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa capaian uji ini menunjukkan bahwa prob. setiap variabel independen diatas sig. $\alpha = 0,05$. Menyimpulkan bahwasanya tidak terdapat heteroskedastisitas pada persamaan yang digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Nilai
DW Statistic	1,859780
Kesimpulan	Tidak ada autokorelasi

Nilai statistik DW Tabel 5 1.859780 Nilai tersebut berada di wilayah yang tidak terdapat autokorelasi, hinga menyimpulkan bahwasanya model regresi bebas dari masalah autokorelasi. Terpenuhinya keseluruhan asumsi klasik menjadi

landasan bahwasanya FEM diterapkan mencapai syarat kelayakan untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Dengan telah terpenuhinya seluruh uji asumsi klasik yang dipersyaratkan, proses analisis kemudian bergerak ke tahap estimasi model regresi data panel menerapkan FEM selaku terpilih. Hasil penilaian secara lengkap disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	37,10395	37,10395	16,70272	0,0000
TPAK	-0,057169	0,018146	-3,150428	0,0019
IPM	-0,172064	0,037107	-4,636983	0,0000
PERTUMBUHAN EKONOMI	-0,075288	0,051875	-1,451342	0,1481
R-squared	0,978180			
Adjusted R-squared	0,975767			
F-statistic	405,3386			
Prob(F-statistic)	0,000000			
Durbin-Watson stat	1,859780			

Dari hasil estimasi pada Tabel 6, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN} = 37.10395 - 0,057169 \text{ TPAK} - 0,172064 \text{ IPM} - 0,075288 \text{ PERTUMBUHAN EKONOMI}$$

Nilai *R-squared* 0,978180 mencerminkan TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan sekitar 97,81 persen dari variasi kemiskinan di Provinsi NTT, adapun 2,19 persen variasi kemiskinan lainnya ditentukan oleh variable lain di luar cakupan model ini. Nilai F-statistik 405,3386 yang disertai probabilitas 0,000000 jauh di bawah 0,05 menjadi bukti kuat bahwasanya keempat variabel bebas secara simultan berdampak nyata pada kerentanan kemiskinan di NTT.

Pembahasan

Berdasarkan output estimasi *Fixed Effect Model* pada Tabel 6, pengujian secara simultan menghasilkan probabilitas F-statistik 0,000000 yang dibawah sig. 0,05, hingga bisa ditegaskan bahwasanya TPAK, IPM, dan pertumbuhan ekonomi bersamaan berdampak pada kemiskinan di Provinsi NTT. Nilai *R-squared* 97,81 persen menandakan bahwa kontribusi keempat variabel tersebut dalam menjelaskan dinamika kemiskinan cukup bermakna, meskipun 2,19 persen sisanya masih dijelaskan variabel lain yang tidak masuk model, semacam isolasi geografis akibat kondisi kepulauan, kesenjangan infrastruktur antar wilayah, serta karakteristik sosial budaya masyarakat NTT.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa TPAK berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di NTT, dengan koefisien -0,057169 serta prob. 0,0019 dibawah 0,05 memperlihatkan tiap kenaikan TPAK 1 persen dapat mengurangi kemiskinan

0,057169 persen. Temuan tersebut menandakan bahwasanya makin banyaknya pekerja yang aktif pada aktivitas ekonomi, maka tinggi kesempatan rakyat guna memperoleh pendapatan dan terbebas kemiskinan. Namun, besarnya pengaruh yang relatif kecil menunjukkan bahwasanya kenaikan keaktifan kerja tidak seluruhnya diiringi kenaikan mutu profesi. Kondisi ini diduga dikarenakan mayoritas pekerja di NTT masih bekerja pada sektor pertanian subsisten dan sektor informal dengan produktivitas serta tingkat pendapatan yang rendah. Capaian riset ini selaras Sianturi et al. (2024). Yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dari capaian penilaian, IPM memperlihatkan koefisien -0,172064 yang signifikan pada probabilitas 0,0000, mengonfirmasi bahwasanya kenaikan IPM mampu menurunkan kemiskinan di NTT. Setiap penambahan satu poin IPM berkorelasi dengan penurunan kemiskinan 0,172064 persen. Capaian ini menyesuaikan teori Todaro, Michael P., (2015) yang menggaris bawahi bahwa perbaikan mutu sumber daya manusia lewat akselerasi pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi pilar terpenting dalam memutus siklus kemiskinan yang terus berulang. Ketika kualitas SDM meningkat yang tercermin dari naiknya IPM, peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan layak turut membesar, sehingga tekanan kemiskinan pun berangsur berkurang. Hasil ini sejalan dengan Kamsina & Khoirudin, (2024) dan Kesuma & Yasa, (2025) yang secara konsisten menemukan bahwa IPM ialah variabel terbanyak yang mendorong penurunan kerentanan kemiskinan di kabupaten/kota NTT.

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien -0,075288 dengan probabilitas 0,1481, sehingga tidak signifikan pada kemiskinan di NTT pada sig. 5 persen. Meskipun koefisien bernilai negatif yang menandakan bahwasanya kenaikan pertumbuhan ekonomi kerap diiringi pengurangan kemiskinan, pengaruh tersebut tidak terbukti statistik. Temuan ini menunjukkan bahwasanya kemajuan ekonomi di NTT tidak seluruhnya bersifat inklusif dan tidak mampu menyalurkan manfaat secara merata kepada kelompok rakyat miskin. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh struktur perekonomian yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, serta belum kuatnya bidang produktif bisa menghasilkan dunia ketenagakerjaan dan menaikkan pendapatan masyarakat secara luas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ngole Bunga & Haryanto, (2024) yang menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di NTT tidak dirasakan proporsional oleh semua rakyat, terutama masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan bergantung pada sektor pertanian subsisten.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan di NTT dipengaruhi antara TPAK dan pertumbuhan ekonomi. Matriks korelasi memperlihatkan bahwasanya TPAK dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif 0,294, mengindikasikan bahwasanya kenaikan aktivitas finansial kerap diiringi meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan

pendapatan masyarakat, dan menurunkan kemiskinan. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya terwujud karena mayoritas pekerja di NTT terserap pada bidang informal dan pertanian subsisten yang mempunyai produktivitas serta tingkat pendapatan relatif rendah. Akibatnya, peningkatan partisipasi kerja dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menjelaskan secara optimal tentang peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Selain itu, IPM menunjukkan pengaruh kuat pada kemiskinan di Provinsi NTT dikarenakan memperlihatkan mutu pekerja dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kehidupan layak. Kenaikan mutu pekerja dapat memperluas akses terhadap pekerjaan yang lebih produktif, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Capaian ini memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan tingginya pekerja saja tidaklah cukup untuk menurunkan kemiskinan secara optimal tanpa didukung oleh peningkatan kualitas manusia. Dengan itu, usaha pemberantasan kerentanan kemiskinan di NTT perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu dengan menaikkan mutu pekerja, memperbanyak peluang pekerjaan, dan menunjang kemajuan finansial inklusif supaya perkembangan bisa merata kepada semua rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa TPAK dan IPM berdampak negatif dan signifikan pada kemiskinan di NTT, sementara pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Pengaruh negatif TPAK menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi mampu mengurangi kemiskinan, walaupun besarnya pengaruh kecil karena sebagian besar tenaga kerja masih terkonsentrasi pada bidang pertanian subsisten dan informal berproduktivitas minim. Sementara itu, IPM terbukti menjadi faktor penting dalam penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup masyarakat mampu memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan memperlihatkan bahwasanya perkembangan ekonomi di Provinsi NTT tidak seluruhnya bersifat inklusif dan belum mampu meraih golongan rakyat miskin secara merata. Kondisi ini menandakan bahwasanya kenaikan indikator makroekonomi tidak pasti secara langsung mampu mengurangi kemiskinan apabila tidak diikuti oleh kenaikan mutu pekerja, penghasilan dunia ketenagakerjaan, dan transformasi struktur ekonomi menuju sektor yang lebih produktif. Menyeluruhnya, penelitian ini menetapkan bahwa pengurangan kemiskinan di NTT memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui pembinaan mutu pekerja, perbanyak peluang pekerjaan bermutu, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berpusat pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, and Abdul Husenudin. 2024. "Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat 2019-2023." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(6). doi: 10.47467/alkharaj.v6i6.1771.
- Arifin, S. R., & Fadllan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016- 2018. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 38–59. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.4555>
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Masyarakat Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313–326. <https://doi.org/10.21776/jdessa.2023.02.2.08>
- Awary, N., Sasmitaningroh, P. N., Sari, A. D., Nilasari, A., Arisetyawan, K., Ekonomika, F., & Bisnis, D. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Jawa Timur Tahun 2018-2023. *Jurnal Bisnis Net*, 7(2), 2621–3982. <https://doi.org/10.46576/Bn.V7i2.5096>
- Azizah, S. N., & Setyowati, E. (2022, Proceedings of the 1st SENARA). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten Kota Terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2017- 2021. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, (1). <https://share.google/WfjZg5qbMDGzHwIA>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur Agustus 2024 (No. 66/11/53/Th. Xxvii). Bps Provinsi Ntt*.
- Borjas, G. J. (2020). *Labor Economics* (8th Ed.). Mcgraw-Hill Education.
- Borjas, G.J. (1979). Job Satisfaction, Wages, And Unions. *The Journal Of Human Resources*, 14(1), 21-40. <https://doi.org/10.2307/145536>
- Christy, N., Asmara, K. A., & Bachtiar, A. (2024). Analisis pengaruh antara pendidikan, kesehatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 678-688. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14431993>
- Dahliah dan Nirwana (2021) "The Influence of Unemployment , Human Development Index and Gross Domestic Product on Poverty level, *Journal of Management, Faculty of Economic and Business, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*, 1(2), pp. 95-108. doi: <https://doi.org/10.52970/grsse.v1i2.84>.
- D., Salsabila, A. K., Amalia, L., Anargya, R. A., Kirana, R. S., & Valentina, V. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 649–657. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i2.4124>

- Firmansah, R., Rizal, M., & Novianto, A. S. (2023). Pengaruh Kesehatan, Upah Minimum, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur 2020- 2022. e - Jurnal Riset Manajemen, 564 - 576. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm>
- Handayani, N. (2021). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.14710/djoe.32658>
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. Independent:Journal of Economics, 1. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>
- Holivil, E. (2020). Ketimpangan Ketenagakerjaan Dan Dinamika Kemiskinan Di Ntt: Analisis Faktor Penyebab Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 203-226.
- Kamsina, S., & Khoirudin, R. (2024). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(01), 15-24. <https://doi.org/10.56741/jgi.V3i01.477>
- Kesuma, I. K. M., & Yasa, I. N. M. (2025). Determinan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8.
- Maulana, R., & Alamsah, J. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Serang Periode 2016-2020. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(6), 985-998. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i6.338>
- Matondang, K. A., Nasution, N. F., Hasibuan, Z. H., Siagian, A. P., Ekonomi, I., Medan, U. N., Medan, K., & Utara, P. S. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. 2(2), 460-468.
- Mumekh, V. G., Rotinsulu, D. Ch., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Provinsi (Ump) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, (1), 49-60.
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic*, Volume Nomor 3, 1-13. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3>
- Naurah, N. (2023). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Ri Membaik, Tumbuh 0,24% Pada Februari 2023*. Goodstats. . <https://Goodstats.Id/Article/Tingkat-Partisipasi-Angkatan-Kerja-Ri-Membaik-Tumbuh-0-24-Pada-Februari-2023-Dvbzn>
- Ngole Bunga, E., & Haryanto, T. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2023. *Jimea / Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3). <https://doi.org/10.31955/Mea.V8i3.4834>

- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Policy Brief Bkkbn Ntt. (2024). *Membangun Nusa Tenggara Timur Melalui Pembangunan Kependudukan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan: Laporan Kependudukan Provinsi Ntt Tahun 2024*.
- Putra, E. J., Haryono, & Pudjowati, J. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Bharanomics*, Vol. 1 No. 2, 51 - 60. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.153>
- Rahajeng, A. S., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 2 Nomor 5, 775 - 784. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.229>
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Rimanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31253/Pe.V21i3.2065>
- Sabyan, M., & Widyanti, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(3), 311-315. <https://doi.org/10.31869/me.v8i3.3813>
- Safitri, A. E., & Iryani, N. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55043/Ekonomipedia.V1i1.94>
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Dewi Nasution, M., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kota Medan (2014-2023). *Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jalakotek.V1i2.2606>
- Suganda, A., Ramadhini, N., Harahap, P. N., Nugrahadi, E. W., & Gultom, G. (2024a). The Effect of HDI and Unemployment Rate on Poverty in the Riau Islands. 08(June), 58-65. <https://doi.org/10.33019/equity.v>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta
- Syauqiah, A. P., Pattiasina, K. W., & Firdausyah, S. (2022, April 1). The Effect of The Unemployment Rate and Minimum Wage on Poverty Rate in West Java. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 215 - 226. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.13567>
- Wijaksana, A. C. (2022). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Periode Tahun 2016-2021. *Profit: Jurnal*

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1, 99-113.
<https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.250>